



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 2637 / UN16.17.01.R/KPT/VII2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS


- Menimbang :
- a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah melaksanakan pengujian tentang konsekuensi berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Bahwa sesuai hasil pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik di Lingkungan Universitas Andalas pada tanggal 25 September 2024, pengaturan Informasi Publik yang Dikecualikan yang ditetapkan dalam keputusan Rektor Universitas Andalas tahun 2023 perlu dicabut
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas yang baru; tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Universitas Andalas;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12);
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik Universitas Andalas tanggal 2 Januari 2023
10. Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik Universitas Andalas Nomor : 2/UN16.17/HM.02/2024 tanggal 25 September 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi DIKECUALIKAN (DIK) di Lingkungan Universitas Andalas, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Informasi pada lampiran surat keputusan penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan Universitas Andalas ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Univeristas Andalas tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 September 2024


REKTOR
UNIVERSITAS ANDALAS
EFA YONNEDI
NIP 197205021996021001

LAMPIRANKeputusan Rektor Universitas Andalas
Nomor : 2637 / UN16.17.01.R/KPT/VII/2024

Tentang : Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Di Lingkungan Universitas Andalas

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2024

No	Klasifikasi Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pertimbangan	Pejabat/Unit/ Fakultas yang menguasai	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Retensi Arsip	
						Aktif	Inaktif
1.	Bidang Pendidikan dan Pembelajaran						
	a Registrasi Akademik	Data Diri Calon Mahasiswa (tempat tanggal lahir, alamat, no. HP, agama, golongan darah, status kawin, NIK, nilai rapor, akta kelahiran, ijazah, sertifikat vaksin)	UU Pasal 17 Huruf H Angka 5 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri kemendikbudristek no 48 tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan sarjana pada PT Bab III tentang pelaksanaan dan pengumuman mahasiswa baru Peraturan Komisi Informasi Pusat no 1 tahun 2021 tentang standar pelayanan publik pasal 22 ayat 1	Direktorat Pendidikan & Pembelajaran	Direktur Pendidikan dan Pembelajaran	1 Tahun setelah mahasiswa lulus	2 Tahun
b Berhenti Kuliiah dan Daftar Nilai		Surat Drop Out (DO) Soal-soal ujian	Perlindungan data diri mahasiswa	Direktorat Pendidikan & Pembelajaran	Direktur Pendidikan dan Pembelajaran	2 Tahun	Inaktif 3 tahun

		Dokumen Sanksi akademik	Perlindungan data diri mahasiswa	Direktorat Pendidikan & Pembelajaran	Direktur Pendidikan dan Pembelajaran	1 Tahun setelah beasiswa selesai	4 Tahun	
		Dokumen pencairan dana	UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 3	Direktorat Kemahasiswaan	Direktur Kemahasiswaan			
		Kartu Hasil Studi (KHS)	Perlindungan data diri mahasiswa	Fakultas & Sekolah Pascasarjana	Dekan & Direktur Sekolah Pascasarjana			
		Transkrip Mahasiswa	Perlindungan data diri mahasiswa	Fakultas & Sekolah Pascasarjana	Dekan & Direktur Sekolah Pascasarjana			
2.		<u>Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset</u>						
		Rincian individu	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Direktorat Keuangan	Direktur Keuangan	2 Tahun setelah tindak lanjut audit/pemeriksaan telah selesai	8 Tahun	
		Penandatanganan honorarium	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi					
		Pajak individu	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi					
3.		<u>Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi</u>						
		Surat lamaran pegawai	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi			2 Tahun setelah diangkat PNS	2 Tahun	
		Surat pernyataan persetujuan (SPP/lolos butuh)	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Direktorat Sumber Daya Manusia	Direktur Sumber Daya Manusia			
		Penerimaan Pegawai dan Dosen						

		Dokumen mutasi keluarga (nikah, anak, cerai dan sejenisnya)	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi			1 Tahun setelah berhe nti/ pensiun	9 Tahun
d	Dokumen Pembinaan/SKP/ Manajemen Kinerja	Dokumen SKP	Pelindungan Data Pribadi	Direktorat Sumber Daya Manusia	Direktur Sumber Daya Manusia		
		Penetapan Angka Kredit	Pelindungan Data Pribadi				
		Peninjauan Masa Kerja	Pelindungan Data Pribadi				
		Surat Tugas Belajar	Pelindungan Data Pribadi				
		Ujian Dinas Pegawai	Pelindungan Data Pribadi				
Daftar hadir pegawai	Pelindungan Data Pribadi						
e	Disiplin Pegawai	Catatan pelanggaran pegawai	Pelindungan Data Pribadi	Direktorat Sumber Daya Manusia	Direktur Sumber Daya Manusia	1 thn anggaran berjalan	2 thn
		Surat Tugas belajar	Pelindungan Data Pribadi				
		Dokumen penjatuhan hukuman disiplin	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
		Surat permohonan	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
		Surat persetujuan/ penolakan	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
f.	Tugas Belajar	Surat Izin belajar	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik	Direktorat Sumber Daya Manusia	Direktur Sumber Daya Manusia		
		Fotokopi Ijazah	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				

	Laporan tugas belajar	DIK UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
8	Dokumen catatan pelanggaran	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik	Direktorat Sumber Daya Manusia	Direktur Sumber Daya Manusia	1 thn anggaran berjalan	2 thn setelah berkekuata n hukum tetap
	Surat teguran	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
	Surat pernyataan tidak puas	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
	Dokumen penundaan gaji berkala	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
	Dokumen penurunan gaji	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
	Dokumen kenaikan pangkat	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
	Dokumen penurunan gaji	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
	Dokumen penurunan jabatan	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4 tentang keterbukaan informasi publik				
	Dokumen pencabutan jabatan	DIK UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H angka 4				

			tentang keterbukaan informasi publik					
Dokumen Cuti Pegawai	Surat permohonan cuti tahunan, jjin sakit, cuti bersalin, cuti besar, cuti alasan penting, cuti sakit dan cuti diluar tanggungan negara	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Direktorat Sumber Daya Manusia	Direktur Sumber Daya Manusia	1 Tahun setelah pelaksanaan	2 Tahun		
	Kesehatan/Asuransi Pegawai	Dokumen program BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan sejenisnya Dokumen pengurusan gaji Dokumen kenaikan gaji Dokumen penyesuaian tunjangan keluarga, dan sejenisnya	Direktorat Sumber Daya Manusia	Direktur Sumber Daya Manusia	2 Tahun setelah tindak lanjut audit/ pemeriksaan telah selesai	8 Tahun		
Dokumen Gaji dan Tunjangan	Dokumen tunjangan jabatan	Perlindungan Data Pribadi	Direktorat Sumber Daya Manusia	Direktur Sumber Daya Manusia				
	Dokumen tunjangan resiko pekerjaan	Perlindungan Data Pribadi						
	Dokumen remunirasi pegawai, dan sejenisnya	Perlindungan Data Pribadi						
	Dokumen perjalanan dinas pegawai	Perlindungan Data Pribadi						
Perjalanan Dinas dan Identitas Pegawai	Nota persetujuan BKN	Perlindungan Data Pribadi			1 Tahun setelahberhenti/ pensiun	9 Tahun		
	SK pengangkatan CPNS	Perlindungan Data Pribadi						

		Fotokopi Ijazah / sertifikat	Perlindungan Data Pribadi				
		SK penempatan / penarikan pegawai	Perlindungan Data Pribadi				
		SK pengangkatan jabatan di luar instansi	Perlindungan Data Pribadi				
		SK persetujuan / pengusasan kembali	Perlindungan Data Pribadi				
		Pensiun / meninggal	Perlindungan Data Pribadi				
		Dokumen Pemberhentian Pegawai	Perlindungan Data Pribadi				2 thn
		Dokumen awal pemeriksaan kasus	Perlindungan Data Pribadi	Direktorat Sumber Daya Manusia	Direktur Sumber Daya Manusia	1 Tahun setelah SK ditetapkan	
		Dokumen keputusan pengadilan	Perlindungan Data Pribadi				
		Dokumen sengketa keperdataan	Perlindungan Data Pribadi				
		Dokumen awal pemeriksaan	Perlindungan Data Pribadi	Direktorat Sumber Daya Manusia	Direktur Sumber Daya Manusia	1 thn setelah SK ditetapkan	2 thn
		Keputusan pengadilan	Perlindungan Data Pribadi				
4.		<u>Bidang LPPM</u>					
	a	Dokumen usulan / review	Perlindungan Data Pribadi	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	2 thn	3 thn
		Dokumen Form Penilaian Penelitian	Perlindungan Data Pribadi				
		Laporan hasil movev	Perlindungan Data Pribadi				

b	Hak Atas Kekayaan Intelektual (Potensial untuk Dipatenkan)	Dokumen HAKI	Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	2 thn	3 thn
		Prosedur pengajuan HAKI, Hak Cipta, Hak Dagang	Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta				
		Surat permohonan pengajuan	Perlindungan Data Pribadi				
		Laporan hasil pengajuan	Perlindungan Data Pribadi				
c	Produk Riset	Naskah Full Paper yang belum dipublikasikan	Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	2 thn	3 thn
		Naskah penelitian yang masih dalam proses	Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta				
		Dokumen usulan /review	Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta			2 thn	8 thn
		Dokumen Form Penilaian	Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta				
d	Inovasi dan Penelitian Tidak potensial paten dan potensial paten	Laporan hasil monev	Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta				
		Dokumen kontrak/perjanjian pelaksanaan penelitian	Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Science Techno Park	Science Techno Park		
		Dokumen usulan /review	Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta				
		Dokumen Form Penilaian Penelitian	Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta				
		Laporan Hasil Monev	Undang-Undang 28 Tahun				

		Surat Keputusan Penerima Penelitian Dokumen publikasi penelitian	2014 tentang Hak Cipta Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta				
e	Informasi Publik	Data pribadi pemohon informasi	Perlindungan Data Pribadi	Humas, Protokol, dan Layanan Informasi Publik	Kepala Humas, Protokol, dan Layanan Informasi Publik	2 thn	3thn
f.	Pernyataan Kuliah	Surat Pertukaran Pelajar KITAS, SKLD dan STM	Perlindungan Data Pribadi	Kantor Layanan Internasional	Kepala Kantor Layanan Internasional	1 thn	1 thn

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS ANDALAS
EFA RONNEDI
NIP. 197205021996021001

